



Dampak Ekonomi Dan Sosial Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Desa Karangpatihan

Siska Nofitiana¹, Sishadiyati², Wiwin Priana Primandhana³

^{1,2,3} Ekonomi Pembangunan, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

Abstract

Received: 23 Oktober 2023
Revised : 30 Oktober 2023
Accepted: 03 November 2023

Rancangan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS adalah bantuan dana dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni. Program ini ditujukan terhadap Masyarakat Berpenghitungan Rendah di beberapa wilayah Indonesia khususnya tergolong dalam Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan peran program BSPS dalam dampak ekonomi dan sosial yang dialami oleh penerima bantuan di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini mencakup 22 Narasumber dari penerima bantuan di Desa Karangpatihan dengan menggunakan metode pengumpulan informasi melalui interview, kuesioner, investigasi, dan pengarsipan. Analisis deskriptif merupakan prosedur pengamatan data yang melibatkan penyampaian data berisi gambaran diagram tabel yang ditaksir menunjukkan Nilai untuk setiap Alokasi golongan Narasumber. Selanjutnya data akan diolah sesuai dengan kebutuhan penelitian dan diinterpretasikan Berlandaskan temuan di lapangan. Dengan adanya program BSPS berdampak ekonomi karena dapat membuka lapangan pekerjaan bagi tukang bangunan dan dampak Keadaan sosial karena dapat mengoptimalkan rasa Tenram serta aman melalui perubahan kontruksi rumah layak huni, namun terkait perekenomian pendapatan tiap bulan penerima bantuan tidak mengalami perubahan.

Keywords: *BSPS, Dampak sosial ekonomi, Masyarakat Berpenghitungan Rendah, Penanganan Kemiskinan Ekstrem.*

(*) Corresponding Author: 120011010060@student.upnjatim.ac.id

How to Cite: Nofitiana, S., Sishadiyati, & Primandhana, W. P. (2023). Dampak Ekonomi Dan Sosial Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Desa Karangpatihan. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10089011>

INTRODUCTION

Latar Belakang

Setiap masyarakat berhak mencapai kehidupan yang makmur dalam jiwa dan mental, bersemayam dan menemukan kawasan yang aman Tenram dan sehat serta berwenang mendapatkan fasilitas kesehatan. Semakin meningkatnya jumlah penduduk yang ada di Indonesia mengakibatkan meluasnya permintaan akan tanah pembangunan rumah untuk tempat tinggal. Akan tetapi, menurut Sabarisa, 2013 mengatakan masih terdapat keterbatasan masyarakat memenuhi kebutuhan rumah layak huni secara fisik dan bangunan mengakibatkan banyak masyarakat memiliki rumah tidak layak huni di pedesaan. Rumah merupakan kebutuhan esensial dalam kehidupan manusia yang setara pentingnya dengan makanan dan pakaian. Rumah termasuk kebutuhan mendasar digunakan untuk pertemuan keluarga dan membawa nilai yang signifikan bagi setiap anggota rumah. Peningkatan penduduk yang signifikan telah mengakibatkan ketidakseimbangan antara permintaan perumahan dan tersedianya perumahan sehingga mengalami *backlog* (kekurangan rumah).

Hal ini terjadi karena pembangunan yang dilakukan belum mampu secara efektif mengurangi kemiskinan karena masih banyak masyarakat yang berpenghitungan jauh di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Akibatnya, peningkatan pertumbuhan ekonomi belum dibarengi dengan pemerataan sumber daya ekonomi. Kebutuhan adalah masalah yang membingungkan, sehingga masih menjadi masalah yang harus diperhatikan oleh otoritas publik Indonesia. Ada dua cara untuk mengatasi kemiskinan yang harus dilakukan. Pertama dan terutama, memenuhi kebutuhan berbagai sektor dan melindungi masyarakat miskin. Kedua, memberikan pelatihan kepada masyarakat miskin sehingga mereka dapat mengambil tindakan untuk menghentikan terjadinya kemiskinan baru. Upaya membunuh kemiskinan dilakukan untuk memahami standar negara, khususnya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur (Royat, 2015).

Untuk mengatasi permasalahan diatas, saat ini pemerintah bersama Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengadakan rencana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang bergerak memberikan bantuan dana di bidang perbaikan rumah tidak layak huni. Program BSPS merupakan program pemberdayaan masyarakat yang difokuskan untuk menjadikan masyarakat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan perbaikan dan pembangunan rumah. Rencana ini ditujukan kepada MBR atau Masyarakat Berpenghitungan Rendah yang sudah lulus validasi dan memenuhi persyaratan dan ketentuan berlaku untuk menerima bantuan pada program BSPS. Pelaksanaan perluasan perumahan untuk MBR disesuaikan dengan prinsip dasar pembangunan nasional yaitu keselarasan, kerukunan, keseimbangan, dan konsensus mutlak dalam semua upaya pembangunan.

Desa karangpatihan Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu daerah yang memperoleh BSPS dengan program pengembangan struktur rumah tidak layak huni. Rencana BSPS tersebut tentunya berdampak pada perbaikan Keadaan fisik rumah tidak layak huni di Desa Karangpatihan bagi warga berpenghitungan rendah, namun tidak sepenuhnya menguntungkan penerima manfaat. Hal ini dikarenakan ada kendala yang dialami oleh beberapa penerima yang mengalami kendala terkait menambah perbaikan diri untuk pembangunan rumah. Mengingat bahwa aset untuk perbaikan atau pembangunan rumah membutuhkan jumlah uang yang sangat besar dan kerusakan pada Keadaan setiap rumah ada;ah beda, maka jenis perbaikannya juga akan berbeda. Narasumber mengakui bahwa hanya mengandalkan bantuan BSPS senilai Rp 20.000.000 tidak cukup untuk membangun atau memperbaiki rumah, sehingga daerah setempat memerlukan biaya tambahan (perbaikan sendiri). Misalnya dengan penjualan hewan peliharaan, cadangan dana tabungan, biaya pemusnahan rumah, dan seterusnya. Sehubungan dengan uraian di atas maka perincian masalah dalam artikel penelitian ini adalah bagaimana pengaruh rencana program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) terhadap perekonomian penerima bantuan di Desa Karangpatihan dan apa pengaruh BSPS terhadap perubahan sosial penerima BSPS di Desa Karangpatihan

METHODS

Dalam penelitian artikel ini dijalankan guna memahami dampak dari rencana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya khususnya akan dampak peringkat

perekonomian serta sosial yang terjadi pada penerima program BSPS di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo. Tipe penelitian dalam artikel ini menerapkan jenis penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, Sugiyo (2016:15) mengungkapkan bahwasannya teknik penelitian kualitatif ialah suatu cara yang bertumpu dari filsafat postpositivisme, metode penelitian kualitatif diaplikasikan untuk penelitian yang berfokus kepada Keadaan obyek yang alamiah. Selain itu, menggunakan teknik pengambilan data melalui triangulasi (gabungan), analisis yang bersifat induktif atau kualitatif. Hitungan yang diperoleh dari menggunakan penelitian kualitatif sendiri adalah menekankan pada makna dari *generalisasi*. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif pada penelitian artikel ini diharapkan mampu mendapatkan informasi secara mendetail terkait penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap Dampak Ekonomi dan Sosial Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Karangpatihan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian artikel ini menggunakan tiga (3) metode, antara lain : (1) pengamatan langsung terhadap subjek penelitian di lokasi penelitian; (2) menggunakan jajak pendapat, yaitu alat pengumpulan informasi yang berisi daftar pertanyaan tertulis yang dikirim dari subjek penelitian atau Narasumber sebagai berbagai pertanyaan yang dikemas dalam beberapa lembar kertas dan dikirimkan kepada Narasumber; (3) berkonsentrasi pada tulisan yang meliputi pembukaan, pencatatan, dan kutipan informasi dari buku, catatan harian, laporan, anggapan yang memenuhi syarat dan berbagai sumber. Selain itu, strategi pemeriksaan informasi menggunakan pemeriksaan penjelasan dengan pengaturan informasi yang menentukan nilai rata-rata setiap kelas jawaban dan ditangani oleh kebutuhan penelitian dan diuraikan Berlandaskan penemuan di lapangan.

RESULTS & DISCUSSION

Results

Desa Karangpatihan merupakan bagian dari Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur. Kecamatan Balong berada di koordinat 111 23'43" BT dan 7 57' 35" LS yang terdiri dari delapan belas (18) desa. Desa Karangpatihan dari Kabupaten Ponorogo berada di sebelah Barat Daya, dengan jarak kurang lebih 20 kilometer dapat ditempuh dalam waktu 30-40 menit. Penelitian artikel ini berfokus terhadap Dukuh Dungus karena di Dukuh tersebut salah satu wilayah yang memperoleh dukungan dari program BSPS. Dalam program BSPS terdapat dua Tingkatan penerima bantuan yaitu reguler dan PKE. Reguler merupakan kelompok masyarakat berpenghitunganan rendah dan diwajibkan untuk menambah swadaya pembangunan rumah, sedangkan PKE (Penanganan Kemiskinan Ekstrem) merupakan kelompok masyarakat berpenghitunganan rendah dan tidak diwajibkan menambah swadaya serta dapat dibantu melalui gotong royong masyarakat setempat.

Tabel 1. Jumlah Unit Penerima Bantuan di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo

Desa/Kelurahan	Tingkatan	Unit
Karangpatihan	Reguler	15
Karangpatihan	PKE 1	11
Karangpatihan	PKE 2	22

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Ponorogo, diolah

Berlandaskan hitungan data tabel diatas, secara umum Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo tahun 2023 lewat Dikjen Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempersembahkan bantuan dana terhadap tiga puluh tiga (33) masyarakat berpenghitunganan rendah dengan rinci kelompok reguler sejumlah 15 penerima bantuan, PKE 1 sejumlah 11 penerima bantuan, dan PKE 2 sejumlah 22 penerima bantuan. Bantuan dari BPS yang diterima oleh penerima bantuan sebanyak Rp 20.000.000 dengan pembagian Rp 17.500.000 guna pembelian bahan bangunan, sedangkan Rp 2.500.000 guna pembayaran gaji pekerja. Bantuan diserahkan melalui rekening tidak secara langsung tunai hal ini dikarenakan untuk meminimalisir penyalahgunaan dana bantuan. Penerima bantuan hanya menerima uang kontan sebesar Rp 2.500.000 yang terbagi menjadi dua tahap untuk pembayaran upah tukang, sedangkan uang bantuan sebesar Rp 17.500.000 akan ditransfer langsung oleh pihak Bank Mandiri ke rekening toko bahan material untuk pembayaran bahan material bangunan rumah yang sudah dipesan oleh penerima bantuan.

Untuk penelitian artikel ini, peneliti menggunakan data penerima bantuan Tingkatan PKE 2 yang berada di Dusun Dungus Desa Karangpatihan Kecamatan Pulung dengan jumlah Narasumber sebanyak 22 penerima bantuan.

Tabel 2. Alokasi Narasumber PKE 2 Berlandaskan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Narasumber	Nilai (%)
1.	Lelaki	17	77,28
2.	Wanita	5	22,72
Total		22	100,00

Sumber : data diolah

Berlandaskan hitungan data tabel diatas menunjukkan bahwasannya sebagian besar narasumber penelitian ialah laki sejumlah 77,28% dan wanita sebesar 22,72%. Sebagian besar narasumber ialah laki-laki dikarenakan rata-rata penerima bantuan BPS di Desa Karangpatihan masih ada kepala keluarga (pihak suami) serta pada saat pengumpulan data dilakukan ketika proses pembangunan kontruksi rumah dilakukan sehingga pekerja atau laki-laki yang mendapatkan bantuan sedang mengerjakan kontruksi sehingga pihak laki-laki berada di rumah. Sedangkan untuk Narasumber pihak perempuan ketika suami mereka belajar dan ada sepeinggal yang berkedudukan janda atau tidak mempunyai sosok suami.

Tabel 3 Alokasi Narasumber PKE 2 Berlandaskan Umur di Desa Karangpatihan

No	Umur (Tahun)	Narasumber	Nilai (%)
1	20-29	1	4,55
2	30-39	0	0
3	40-49	2	9,09
4	50-59	6	27,28
5	60-69	9	40,90
6	70-79	2	9,09
7	80-89	2	9,09
Total		22	100,00

Sumber : data diolah

Berlandaskan hitungan data tabel diatas menunjukkan bahwasannya paling banyak penerima bantuan di Desa Karangpatihan berusia antara 60 tahun sampai 69 tahun dengan jumlah 9 orang atau senilai dengan 40,90%. Sedangkan penerima bantuan dengan usia rentang 20 tahun sampai 29 tahun hanya terdapat satu orang saja dengan nilai Nilai sebesar 4,55%. Narasumber dengan rentang usia 40 tahun sampai 49 tahun sejumlah 2 orang atau senilai dengan 9,09%. Narasumber dengan rentang usia 50 tahun sampai 59 tahun sejumlah 6 orang atau senilai dengan 27,28%. Narasumber dengan rentang usia 70 tahun sampai 79 tahun dan 80 tahun sampai 89 tahun masing-masing sama banyak dengan jumlah 2 orang atau senilai dengan 9,09%. Penerima bantuan di Desa Karangpatihan untuk rentang usia 30 tahun sampai 39 tahun sejumlah nol (0) atau tidak ada sama sekali karena menurut peneliti di usia tersebut masyarakat masih terbilang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya belum tergolong ke Tingkatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE).

Tabel 4. Alokasi Narasumber Berlandaskan Jenis Pekerjaan di Desa Karangpatihan

No	Pekerjaan	Jumlah	Nilai
1	Petani	14	63,63
2	Wiraswasta	6	27,27
3	Ibu Rumah Tangga	1	4,55
4	Karyawan Swasta	1	4,55
Total		22	100,00

Sumber : data diolah

Berlandaskan perhitungan hitungan data diatas menunjukkan bahwa jenis pekerjaan penerima bantuan di Desa Karangpatihan mayoritas bekerja sebagai petani sejumlah 14 orang atau senilai dengan 63,63%. Selanjutnya pada urutan kedua terbanyak yaitu jenis pekerjaan sebagai wiraswasta dengan jumlah 6 orang atau setara dengan 27,27%. Jenis pekerjaan terakhir yang terdata adalah sebagai ibu rumah tangga dan karyawan swasta yang masing-masing berjumlah 1 orang atau setara dengan 4,55%. Narasumber perempuan yang berjumlah 5 orang rata-rata mereka bekerja sebagai petani sekadar satu warga yang selaku ibu rumah tangga. Hal ini dapat disimpulkan nilai pekerjaan petani lebih besar dikarenakan sebagian besar tanah yang ada terdapat sawah dan juga beberapa perkebunan sayur atau buah sehingga banyak warga Desa Karangpatihan yang bekerja sebagai petani. Kurangnya tingkat pendidikan mengakibatkan minimnya keterampilan yang dimiliki atau dikuasai sehingga banyak orang terutama pihak suami bekerja di bidang petani dan wiraswasta, mereka berperan dikarenakan menyesuaikan komponen keahlian, sumber daya alam serta geografis lingkungan sekitar.

Tabel 5. Alokasi Narasumber Berlandaskan Pendapatan Keluarga di Desa Karangpatihan

No.	Penghasilan/Bulan	Jumlah	Nilai (%)
1	Tidak Ada Penghasilan	0	0
2	Kurang dari Rp 500.000	0	0
3	Rp 500.000 s/d Rp 750.000	19	86,37
4	Rp 750.000 s/d Rp 1.000.000	3	13,63
5	Lebih dari Rp 1.000.000	0	0
Total		22	100,00

Sumber : data diolah

Berlandaskan hitungan data diatas menunjukkan bahwasannya tingkat pendapatan narasumber per bulan sebanyak 86,37% atau 19 penerima bantuan berpenghitungan mulai dari Rp 500.000 sampai Rp 750.000, berlandaskan dari pengamatan wawancara dari 19 penerima bantuan sejumlah 17 orang berpenghitungan di angka Rp 500.000 sedangkan sisanya berpenghitungan di angka Rp 700.000 dan Rp 750.000. selanjutnya terdapat tiga narasumber atau senilai dengan 13,63% yang memiliki penghitungan di rentang Rp 750.000 sampai Rp 1.000.000, dari ketiga narasumber di range nominal tersebut hanya satu penerima bantuan yang memiliki penghitungan di angka Rp1.000.000. mengenai ini bisa diambil kesimpulan bahwasannya masyarakat penerima bantuan di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo tergolong dalam kemiskinan ekstrem dikarenakan penghitungan perbulan jauh dari nilai UMP/UMK Ponorogo yang sebesar Rp 1.954.281. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pendapatan penerima BSPS masih tergolong sangat rendah karena mayoritas berpenghitungan di bawah Rp 1.000.000 tak terdapat yang melebihi nominal Rp 1.000.000. Sehingga hal tersebut menjadi salah satu landasan mereka sebagai pemeroleh Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, karena dengan pendapatan yang kecil membuat mereka tidak bisa memperbaiki komponen struktur rumah yang rusak. Menurut hitungan dari wawancara kepada penerima bantuan menyampaikan bahwa tidak ada perubahan gaji selama sebelum dan selepas mengikuti agenda Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dikarenakan tanggungan yang mereka lakukan masih tetap.

Tabel 6. Alokasi Biaya Narasumber Guna Modal Pelengkap (Swadaya) Program BSPS di Desa Karangpatihan

No	Nilai Biaya	Jumlah	Nilai (%)
1	Tak Terdapat Biaya	0	0
2	Kurang dari Rp 10.000.000	0	0
3	Rp 10.000.000 s/d Rp 14.900.000	0	0
4	Rp 15.000.000 s/d Rp 19.999.000	4	18,19
5	Rp 20.000.000 s/d Rp 29.999.000	12	54,54
6	Lebih dari Rp 30.000.000	6	27,27
Total		22	100,00

Sumber : data diolah

Berlandaskan hitungan diatas menunjukkan swadaya yang dikeluarkan oleh penerima bantuan selama progres pembangunan rumah program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Mayoritas pengeluaran penerima bantuan di Desa Karangpatihan diatas Rp 15.000.000. pengeluaran swadaya tertinggi berada di range nominal Rp20.000.000 s/d Rp29.999.000 yang dikeluarkan oleh dua belas (12) penerima bantuan atau senilai dengan 54,54%. Selanjutnya urutan kedua berada di range nominal lebih dari Rp 30.000.000 yang dikeluarkan oleh enam (6) penerima bantuan atau senilai dengan 27,27%. Dan terakhir berada di range nominal Rp 15.000.000 s/d Rp 19.999.000 yang dikeluarkan oleh empat (4) penerima bantuan atau senilai dengan 18,19%. Sehingga dapat disimpulkan penerima bantuan di Desa Karangpatihan memiliki swadaya yang bisa terbilang cukup besar karena tidak ada yang berada di bawah nominal Rp 15.000.000, hal ini dikarenakan penerima bantuan mayoritas memiliki hewan ternak seperti sapi,

kambing yang bisa dijual dengan nominal besar untuk menambah swadaya serta bekas bongkaran rumah lama dijual kembali sehingga mereka dapat memiliki swadaya dengan nominal cukup besar. Terdapat beberapa penerima bantuan yang sudah menyicil untuk membeli beberapa bahan material di tahun-tahun sebelumnya menerima program BSPS.

Tabel 7. Banyaknya Pekerja serta Tempo Penyelesaian Agenda BSPS di Desa Karangpatihan

No		Angka	Average/Rumah
1	Banyak Pekerja	44	1-2 orang
2	Tempo Penyelesaian Perhari	-	8 Jam
3	Tempo Penyelesaian Rumah	-	25 Hari

Sumber : data diolah dari data primer

Berlandaskan hitungan data diatas menunjukkan jumlah tukang yang mengerjakan pembangunan rumah penerima bantuan. Sebagian besar penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya menggunakan 2 pekerja yang terdiri (1 tukang, 1 penerima bantuan) dan sebagian sisanya dikerjakan sendiri atau bergotong royong. Awalnya dengan program BSPS dari Direktorat Perumahan ini bertujuan untuk menumbuhkan jiwa sosial warga seperti gotong royong saling membantu dalam pembangunan rumah penerima bantuan sehingga muncul kebersamaan warga daerah setempat. Namun demikian, pada tahun 2018 mengacu pada Pedoman Pendeta Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 295/KPTS/M/2018 tentang Luas dan Luas Penginapan Swadaya Pembantu Energizer, porsi rencana keuangan untuk gaji buruh mengalami penyesuaian sebesar kerangka partisipasi bersama untuk memanfaatkan tenaga kerja (ahli). Terdapatnya alokasi perhitungan guna gaji pekerja membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat untuk menjadi tukang bangunan di Desa Karangpatihan, dimana Berlandaskan tabel diatas menunjukkan jumlah pekerja yang mampu terserap di Desa Karangpatihan yaitu sejumlah empat puluh empat (44) orang dengan rata-rata 1 rumah penerima bantuan terdiri dari dua (2) orang tukang bangunan dan lama pengerjaan perhari kurang lebih selama 8 jam tergantung dengan Keadaan cuaca daerah setempat serta deadline lama pengerjaan rumah Berlandaskan ketentuan BSPS adalah 25 hari namun tetap melihat Keadaan di lapangan mayoritas pengerjaan rumah penerima bantuan di Desa Karangpatihan lebih dari 25 hari. Hal ini dapat disimpulkan bahwa program BSPS saat ini belum mampu mencapai tujuan untuk menumbuhkan jiwa sosial warga daerah setempat karena sistem pengerjaannya melalui tenaga kerja bukan dengan gotong royong warga daerah setempat.

Saat ini untuk tujuan capaian program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya beralih terhadap membuka lapangan pekerjaan di Daerah setempat penerima bantuan dikarenakan perubahan alokasi anggaran untuk upah tenaga kerja. Dana bantuan dari program BSPS mengalami peningkatan yang awalnya berjumlah Rp 15.000.000 sekarang jumlah dana bantuan BSPS sejumlah Rp20.000.000 dengan pembagian Rp17.500.000 untuk pembelian bahan bangunan sisanya Rp2.500.000 untuk pembayaran upah pekerja. Beserta mayoritas pekerja di

tiap rumah ialah dua orang, sehingga perhitungan banyaknya tenaga kerja tukang bangunan BSPS di Desa Karangpatihan sejumlah 44 orang. Artinya program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dapat menyerahkan 44 warga pekerjaan dengan estimasi penghasilan tiap pekerja bangunan sebesar Rp 2.500.000 : 2 = Rp 1.250.000/orang. Dengan demikian dapat disimpulkan program BSPS berperan dalam meningkatkan lapangan pekerjaan melalui tersedianya pekerja tukang bangunan dalam pembangunan rumah penerima bantuan di Desa Karangpatihan

Tabel 8. Alokasi Narasumber Berlandaskan Ketentraman Tinggal Sebelum dan Selepeas BSPS di Desa Karangpatihan

No	Tingkatan	Sebelum BSPS		Selepas BSPS	
		Narasumber	Nilai (%)	Narasumber	Nilai (%)
1	Sangat Tentram	0	0,00	15	68,19
2	Tentram	4	18,19	7	31,81
3	Kurang Tentram	11	50,00	0	0,00
4	Tidak Tentram	7	31,81	0	0,00
Total		22	100,00	22	100,00

Sumber : data diolah

Berlandaskan hitungan data diatas menunjukkan bahwa sebelum terseedianya bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya terdapat 50% penerima dana yang merasa kurang Tentram dengan Keadaan rumah milik mereka. Sebagian lagi masih 31,81% dengan jumlah tujuh (7) penerima bantuan merasa tidak Tentram sisanya sebesar 18,19% dengan jumlah empat (4) penerima bantuan sudah merasa Tentram dengan Keadaan rumah namun juga masih terdapat beberapa titik kerusakan rumahnya, serta menurut hitungan wawancara penerima bantuan di Desa Karangpatihan tidak ada yang merasa sangat Tentram dengan Keadaan rumah mereka sebelum diperbaiki melalui program BSPS. Terkait ini ditimbulkan karena keadaan rumah mereka yang tergolong rumah tak layak huni seperti papan rapuh yang membentuk dinding rumah, atap banyak yang bocor, serta lantai rumah masih terbuat dari tanah yang berarti mereka tidak dapat memperbaiki rumahnya karena tidak mempunyai cukup uang. Setelah penerima bantuan menerima BSPS, mayoritas Narasumber sejumlah 15 orang atau setara dengan 68,19% menyatakan bahwa sudah tinggal di rumah dengan sangat Tentram sisanya berjumlah 7 orang atau setara dengan 31,81% merasa Tentram dengan Keadaan rumah mereka setelah perbaikan atau pembangunan rumah melalui program BSPS. menurut hitungan wawancara, tidak ada Narasumber yang mengaku merasa tidak Tentram. Narasumber sekeluarga yang menetap serta bekerja di rumah yang sama merasa lebih Tentram ketika Keadaan rumah mereka lebih membaik awal mula rumah tak layak huni mewujudkan rumah layak huni.

Tabel 9. Alokasi Keadaan Rumah Berlandaskan Pencahayaan, Penghawaan, dan Akses Sanitasi Sebelum dan Selepas menerima BSPS di Desa Karangpatihan.

No	Keadaan Rumah	Keadaan Awal		Keadaan Akhir	
		Buruk	Baik	Buruk	Baik
1	Pencahayaan	0	22	0	22

2	Penghawaan	9	13	3	19
3	Akses Sanitasi	15	7	0	22

Sumber : data diolah

Berlandaskan hitungan data diatas menunjukkan bahwasannya kebanyakan penerima bantuan di Desa Karangpatihan sudah memiliki penerangan yang cukup baik sebelum mendapat bantuan program BSPS karena listrik di Desa Karangpatihan sudah tersebar rata. Namun, masih terdapat 9 rumah yang masih minim untuk penghawaan karena memiliki sedikit jendela sehingga udara sulit masuk. Selanjutnya untuk akses sanitasi atau kloset masih tergolong mayoritas dalam keadaan buruk karena sejumlah 15 rumah penerima bantuan memiliki kloset dengan Keadaan kurang baik, sebagian juga ada yang masih belum memiliki secara pribadi. Ketika penerima bantuan mendapatkan bantuan dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, berhitungn mengerjakan dan menambah udara selepas rumah penerima diperbaiki, terpenting terhadap bagaian dinding dimana 6 rumah telah menambahkan jendela sehingga udara dipastikan bisa masuk. Akan tetapi, masih ada 3 rumah yang masih belum maksimal di bagian penghawaannya. Selanjutnya pada akses sanitasi yang buruk semuanya sudah diperbaiki menjadi masing-masing ruma memiliki kloset pribadi yang berada di dalam rumah serta tidak ada perbaikan dalam pencahayaan Keadaan penerangan rumah karena sebelumnya sudah terbilang cukup bagus.

Tabel 10. Alokasi Keadaan Rumah Berlandaskan Bahan Dinding Rumah Sebelum dan Selepas menerima BSPS di Desa Karangpatihan

No	Tingkatan Dinding	Keadaan Awal		Keadaan Akhir	
		Narasumber	Nilai (%)	Narasumber	Nilai (%)
1	Tembok Tanpa Plester	8	36,37	0	0,00
2	Kayu	14	63,63	0	0,00
3	Bata Ringan	0	0,00	22	100,00
Jumlah		22	100,00	22	100,00

Sumber : data diolah

Berlandaskan hitungan diatas menunjukkan bahwa sebelum menerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya rumah penerima bantuan mayoritas ber dinding kayu dengan sejumlah 14 rumah atau senilai dengan 63,63% dan sebagian ber dinding tembok tanpa plester dengan sejumlah 8 rumah atau senilai dengan 36,37%. Setelah menerima program BSPS penerima bantuan di Desa Karangpatihan Tingkatan PKE II dengan jumlah 22 penerima bantuan berpindah dengan ber dinding bata ringan karena bata ringan cukup murah dan cukup cepat dalam proses pembangunannya.

Tabel 10. Alokasi Keadaan Rumah Berlandaskan Bahan Dinding Rumah Sebelum dan Selepas menerima BSPS di Desa Karangpatihan

No	Tingkatan Lantai	Keadaan Awal		Keadaan Akhir	
		Narasumber	Nilai (%)	Narasumber	Nilai (%)
1	Tanah	8	36,37	0	0,00
2	Plesteran	14	63,63	0	0,00
3	Rabat Plasteran	0	0,00	22	100,00

Jumlah	22	100,00	22	100,00
---------------	-----------	---------------	-----------	---------------

Sumber : data diolah

Berlandaskan hitungan data diatas menunjukkan bahwa sebelum menerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya mayoritas rumah penerima bantuan masih plesteran sejumlah 14 orang atau senilai dengan 63,63% dan sisanya masih dengan lantai tanah dengan jumlah 8 orang atau senilai dengan 36,37%. Lantai dengan tanah dan plesteran masih belum memenuhi ketentuan rumah layak huni dari program BSPS, sehingga setelah mendapatkan bantuan BSPS penerima bantuan di Desa Karangpatihan menggunakan lantai dengan bahan rabat plesteran.

CONCLUSION

Kesimpulan

Bersandarkan susunan analisis tentang “Dampak Ekonomi dan Sosial Program Bantuan Perumahan Swadaya di Desa Karangpatihan” mampu diambil kesimpulan bahwasannya agenda BSPS ini berdampak di bidang ekonomi dikarenakan selama kegiatan berlangsung menggunakan jasa tukang bangunan sehingga membuka lapangan pekerjaan bagi warga setempat di Desa Karangpatihan serta dengan adanya program BSPS penerima bantuan mampu meningkatkan kualitas rumahnya karena 100% mampu untuk menambah swadaya dalam penambahan bahan material untuk pembangunan rumah namun, program BSPS ini tidak berdampak kepada transfigurasi penghasilan perbulan penerima bantuan sebelum dan selepas menerima agenda ini masih tetap sama tidak berubah. Program BSPS di Desa Karangpatihan juga berdampak di bidang sosial dikarenakan kapabel mengembangkan serta membagikan rasa Tentram dan aman kepada penerima bantuan serta meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat karena melalui program BSPS terdapat perubahan Keadaan penghawaan, pencahayaan, dan akses sanitasi yang sesuai dengan ketentuan rumah layak huni dari BSPS. Melalui wawancara dengan 22 penerima bantuan di Desa Karangpatihan merasa puas dengan program ini karena dapat memperbaiki keadaan struktur dinding, lantai, dan atap rumah yang lebih aman.

Saran

Adapun saran dari penulis untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya antara lain :

1. Bagi Kementerian PUPR, pada program BSPS diharap di periode selanjutnya bisa lebih meluas atau menambah jumlah kuota penerima bantuan di seluruh wilayah Indonesia khususnya pada daerah terpencil atau daerah yang rawan gempa agar mereka memiliki rumah yang lebih layak untuk dihuni serta masih terdapat rumah yang tak layak huni namun masih ditinggali karena keterbatasan dana untuk memperbaiki rumah tersebut.
2. Bagi penerima bantuan program BSPS, diharapkan untuk mampu memahami terkait program BSPS yang dijelaskan ketika kegiatan sosialisasi sehingga untuk progres kontruksi bisa selesai pada waktu yang sudah ditentukan oleh Tenaga Fasilitator dan dengan struktur komponen yang sesuai dengan ketentuan dari BSPS.

3. Bagi Tenaga Fasilitator, diharapkan dalam melakukan pendampingan untuk lebih sering turun ke lapangan sehingga dapat mengetahui progres yang dilakukan penerima bantuan serta bisa terus mengingatkan terkait deadline penyelesaian pembangunan rumah.

REFERENCES

- Agus, F., Fanny, S., & Muliana, R. (2020). Efektivitas Implementasi Program Perumahan Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kota Pekanbaru (Studi Kasus : Kecamatan Tenayan Raya). *Jurnal Saintis*, 20(02), 101–109. [https://doi.org/10.25299/saintis.2020.vol20\(02\).5710](https://doi.org/10.25299/saintis.2020.vol20(02).5710)
- Arimurty, A., & Manaf, A. (2013). Lembaga Lokal dan Masyarakat dalam Pemenuhan Kebutuhan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 9(3), 307. <https://doi.org/10.14710/pwk.v9i3.6542>
- B, I., & Sadriah, S. (2020). Pengaruh Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Bsps) Terhadap Pengentasan Kemiskinan. *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*, 2(2), 103–116. <https://doi.org/10.31605/jepa.v2i2.661>
- Ida Farida. (2020). Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Bsps) Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Di Kabupaten Subang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7, 35–47.
- Khairunnisa, & Nasruddin. (2019). Peranan BSPS Terhadap Ekonomi dan Sosial Penerima Bantuan di Kecamatan Simpang Empat. *JIEP : Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 2(3), 1–23.
- Meilia, A., Safitri, D., Sutiyoso, B. U., & Si, M. (2019). *Annisya Meilia Dwi Safitri, Dampak Ekonomi Dan Sosial Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu.*
- Nalatissifa, H., & Ramdhani, Y. (2020). Sistem Penunjang Keputusan Menggunakan Metode Topsis Untuk Menentukan Kelayakan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). *MATRIK : Jurnal Manajemen, Teknik Informatika Dan Rekayasa Komputer*, 19(2), 246–256. <https://doi.org/10.30812/matrik.v19i2.638>
- Nasruddin, R., & Haq, I. (2020). Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(7). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15569>
- Nisa, N. K., & Salomo, R. V. (2019). Keterlibatan Masyarakat dalam Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Pabedilankulon Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v4n1.p1-7>
- Sirait, R., Sinaga, R. S., & Lubis, M. S. (2021). *Strukturasi : Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik Implementasi Undang-Undang No . 1 Tahun 2011 Terhadap Kondisi Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Di Kota Medan Implementation Of Law No . 1 Of 2011 On The Condition Of Housing F.* 3(1), 44–56. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i1.524>
- Tursilarini, T. Y., & Udiati, T. (2020). Dampak Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Kesejahteraan Sosial Keluarga Penerima Manfaat di

kabupaten Bangka. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*,
44(1), 1–21.
[https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/mediainformasi/article/view/1973/
pdf](https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/mediainformasi/article/view/1973/pdf)